

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yaitu mensejahterakan masyarakat yang adil dan makmur, diperlukan pembangunan disegala sektor. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan partisipasi dari masyarakat, dikarenakan erat kaitannya dengan taraf hidup masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan biaya yang cukup besar dan salah satu sumbernya adalah dari sektor pajak. Pajak tersebut bersumber dari masyarakat, oleh karena itu kesadaran membayar pajak harus selalu ditingkatkan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Pajak merupakan alat untuk kepentingan bersama yang menjadi tanggung jawab rakyat Indonesia. Untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah membuat kebijakan diantaranya dalam pemungutan pajak dipercayakan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Pajak penghasilan terbagi dalam beberapa jenis dan ada yang bersifat final. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan. Pengenaan PPh Final sebagian berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2). Namun demikian, ada juga pengenaan PPh final berdasarkan Pasal lain yaitu Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang PPh.

Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha konstruksi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2008 menetapkan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan, dimana pajak penghasilan yang diterima dapat dikenakan

potongan pajak yang bersifat final berdasarkan UU Pajak Penghasilan Nomer 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Pemotongan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang dan pajak penghasilan yang dikenakan tidak dapat dikreditkan. Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan perekonomian dunia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 tanggal 20 Juli 2008 dan berlaku mundur mulai tanggal 1 Januari 2008 untuk menyederhanakan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahn serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak usaha jasa konstruksi. Pengenaan Pajak Final atas usaha jasa konstruksi ini menimbulkan kritis dan protes dari Wajib Pajak. Pada akhirnya Pemerintah memutuskan untuk mengubah PP Nomor 51 Tahun 2009 dengan PP Nomor 40 Tahun 2009 yang terbit tanggal 4 Juni 2009, dengan dasar pertimbangan untuk memberikan kemudahan dalam pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

Pencatatan dalam pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 sangat penting peranannya dalam perusahaan, karena dari analisis digunakan oleh pihak intern maupun ekstern perusahaan untuk mengetahui jumlah peredaran atau penerimaan penghasilan bruto serta penghasilan yang dikenakan PPh final sehingga dapat menggambarkan jumlah peredaran/penerimaan bruto dari penghasilan atas persewaan tanah dan /atau bangunan kepada perusahaan lain.

PT Putra Mas Indah Baroe merupakan salah satu klien dari KJA Ratya Mardika T.K. dan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi merupakan subjek pajak dalam negeri sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi, mulai dengan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) yang dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang **“Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi pada PT Putra Mas Indah Baroe Oleh KJA Ratya Mardika T.K Semarang”**.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup penulisan laporan. Hal ini dikarenakan luasnya kegiatan dalam bidang perpajakan terutama pajak penghasilan. Maka ruang lingkup penulisan laporan yang akan diambil yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian PPh Final
2. Dasar Hukum PPh Final atas usaha jasa konstruksi
3. Subjek dan Objek pajak PPh Final atas usaha jasa konstruksi
4. Dasar pengenaan tarif PPh final.
5. Prosedur pemotongan, penyetoran, pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 pada PT Putra Mas Indah Baroe.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai setelah melakukan serangkaian kegiatan. Tujuan dari disusunnya Tugas Akhir ini antara lain :

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah diperoleh dalam perkuliahan.
2. Memberikan pengetahuan dan pengalaman dunia kerja bagi mahasiswa untuk lebih siap dalam menghadapi persaingan kerja.
3. Mengetahui pemahaman wajib pajak mengenai PPh Final Pasal 4 ayat 2.
4. Untuk mengetahui prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 pada PT Putra Mas Indah Baroe.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan dari penulisan Tugas Akhir ini antara lain:

1. Bagi Instansi

Merupakan masukan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam negeri melaksanakan kewajiban membayar pajak khususnya Pajak Penghasilan.

2. Bagi Penulis

Untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan dalam mengamati dan mengevaluasi kenyataan-kenyataan dalam pekerjaan dengan menerapkan teori dan pengetahuan yang telah diperoleh selama pendidikan tentang prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 pada PT Putra Mas Indah Baroe.

3. Bagi Pembaca

Merupakan tambahan informasi yang bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi mahasiswa maupun staf pengajar Universitas Diponegoro yang ingin mendalami masalah perpajakan.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Laporan

Dalam rangkaian penyusunan suatu laporan agar menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, relevan, dan objektif. Maka sangat diperlukan sebagai data untuk mendukung hasil laporan. Jenis data yang diperlukan dalam menyusun Laporan Tugas akhir adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data (Wibisosno,

2013). Penulis memperoleh data melalui dokumen dari PT Putra Mas Indah Baroe dan KJA Ratya Mardika T.K.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masa lalu/historis (Wibisono, 2013). Data sekunder dalam tugas akhir ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature, dan bacaan yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang otoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah) (Keraf, 2001). Dalam hal ini dilakukan wawancara dengan salah satu staff keuangan di PT Putra Mas Indah Baroe dan staff akuntan di KJA Ratya Mardika T.K.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca atau memanfaatkan buku-buku untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan pendapat ahli dengan menempatkan kesimpulan tersebut sebagai metode tersendiri untuk merumuskan sesuatu pendapat baru yang berikutnya lebih menekankan pengutipan-pengutipan untuk memperkuat uraian (Keraf, 2001). Studi pustaka ini dilakukan dengan membaca dan mencatat dari buku-buku referensi yang berhubungan dengan penulisan laporan tugas akhir serta mencatat data dan arsip-arsip lain yang diperlukan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan oleh penulis dalam Tugas Akhir ini, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini.

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR JASA AKUNTANSI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum seperti sejarah singkat KJA Ratya Mardika T.K, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Lingkup bidang usaha, Struktur Organisasi dan Deskripsi jabatan KJA Ratya Mardika T.K.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian-pengertian yang terkait Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, Dasar Hukum PPh Final atas usaha jasa konstruksi, subjek dan objek Pajak PPh Final atas usaha jasa konstruksi, penghasilan yang dikenakan PPh Final, dasar pengenaan tarif PPh Final serta prosedur pemotongan, penyetoran, pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 pada PT Putra Mas Indah Baroe

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diuraikan pada BAB III untuk pembaca lebih mudah memahami.